



DUKUNGAN ANGGARAN MAKSIMAL

Warga Yogya

Sekolah Gratis Hingga SMA

YOGYA (KR) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tahun 2013 telah disetujui DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Dari total pendapatan sebesar Rp 1,06 triliun, anggaran paling besar berada pada urusan pendidikan yang mencapai Rp 119 miliar.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoyroyekti, besarnya alokasi untuk pendidikan tersebut akan dititikberatkan pada program penjaminan pendidikan. Terutama menyukseskan pendidikan gratis bagi warga Yogyakarta hingga jenjang SMA/SMK. "Kami memiliki semangat untuk mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Jangan ada lagi warga yang tidak sekolah karena biaya," ungkapnya, Selasa (11/12).

Henry menambahkan, kesiapan pengguna anggaran, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, mutlak dibutuhkan. Terutama pemetaan kebutuhan biaya operasional masing-masing sekolah yang selama ini

dibebankan kepada orangtua siswa. Dicontohkannya, beban orangtua yang paling berat ialah untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA-SMK. Pasalnya, saat pertama kali melakukan pendaftaran, selalu disodori biaya investasi atau sering dikenal uang gedung. Pada tahun 2013 mendatang, biaya investasi tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Dinas Pendidikan seharusnya sudah bisa melihat kebutuhan sekolah melalui Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS). Harus segera bergerak, jangan sampai tidak siap," tandasnya.

Oleh karena itu, jika alokasi anggaran dalam APBD murni tersebut nantinya masih kurang, maka akan dituangkan dalam APBD perubahan.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori mengungkapkan, pemerintah memang berkomitmen untuk mengurangi pembiayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Pada jenjang SD hingga SMP, sudah dapat ditutup melalui bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, DIY maupun kota. Sedangkan jenjang SMA/SMK selama ini hanya dibantu pemkot melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Pada tahun 2012, besaran BOP mencapai Rp 3,9 miliar kemudian dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar dalam APBD Perubahan. Anggaran itu pun masih diberikan pada SMA/SMK negeri saja. Rata-rata sekolah mendapatkan bantuan BOP sebesar Rp 250 juta untuk SMA negeri dan Rp 350 juta untuk SMK negeri. Sehingga untuk menutupi kekurangan operasional sekolah, jenjang SMA/SMK masih diperbolehkan melakukan pungutan sesuai aturan yang berlaku.

Namun demikian, dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang sangat tinggi di tahun 2013, memberi peluang supaya pungutan tersebut di-tiadakan dan menjadi tanggungan pemerintah.

Untuk itu, bantuan BOP ke depan tidak lagi ditupai bagi tiap sekolah, melainkan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak didik. Baik yang bersekolah di SMA/SMK negeri maupun swasta. "Secara teknis, kami masih perlu menghitung kebutuhan persiswa yang selama ini ditanggung oleh orangtua," terangnya.

Kendati pengeluaran sekolah sudah bisa diketahui melalui RABS, namun pihak sekolah juga wajib transparan. Diakui Budi, kebutuhan masing-masing sekolah bervariasi sesuai dengan ciri khas serta kearifan lokal sekolah. Jika transparansi sekolah dapat dipertanggungjawabkan, maka bantuan BOP untuk sekolah gratis hingga jenjang SMA/SMK juga mudah terealisasi. (R-9) - m

Instansi
1. DRDPK
2. Bappera
3. Din. Pendidikan
4.
5.

Positif
 Biasa
 Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005